

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Bersumber pada hasil serta pembahasan yang telah dilakukan terkait pengaruh PAD, DAU, DAK, DBH serta Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (LPDS) kepada belanja daerah seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia periode 2018. Selanjutnya bisa ditarik kesimpulan yakni seperti berikut:

1. PAD kepada belanja daerah melalui tingkat signifikansi $0.000 < 0.05$ dan nilai koefisien yang mengarah positif maka bisa didefinisikan jika PAD punya pengaruh positif kepada belanja daerah. Sehingga semakin tinggi PAD yang dipunya dari pemerintah daerah akan seiring dengan meningkatnya belanja daerah yang didanai oleh PAD.
2. DAU kepada belanja daerah melalui tingkat signifikansi $0.000 < 0.05$ serta nilai koefisien yang mengarah positif maka bisa didefinisikan jika Dana Alokasi Umum punya pengaruh positif kepada belanja daerah. Kemudian mengakibatkan semakin tinggi DAU yang diterima dari pemerintah daerah akan seiring dengan meningkatnya belanja daerah yang didanai atas DAU.
3. DAK kepada belanja daerah melalui tingkat signifikansi $0.000 < 0.05$ dan nilai koefisien yang mengarah positif maka bisa didefinisikan jika DAK punya pengaruh positif kepada belanja daerah. Sehingga semakin tinggi DAK yang diterima dari pemerintah daerah akan seiring dengan meningkatnya belanja daerah yang didanai atas DAK.
4. DBH kepada belanja daerah melalui tingkat signifikansi $0.000 < 0.05$ beserta nilai koefisien yang mengarah positif sehingga bisa diartikan jika DBH punya pengaruh positif kepada belanja daerah. Sehingga semakin tinggi DBH yang

5. didapat dari pemerintah daerah akan seiring dengan meningkatnya belanja daerah yang didanai oleh DBH.
6. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (LPDS) kepada belanja daerah melalui tingkat signifikansi $0.000 < 0.05$ serta nilai koefisien yang mengarah positif maka bisa didefinisikan LPDS punya pengaruh positif kepada belanja daerah. Sehingga semakin tinggi LPDS yang diterima dari pemerintah daerah akan seiring dengan meningkatnya belanja daerah yang didanai atas LPDS.
7. Analisis Flypaper Effect

Belanja daerah Kabupaten/Kota di Indonesia mengalami Flypaper Effect. Dengan adanya Flypaper Effect menandakan bila pemerintah daerah menjadi bergantung kepada dana transfer dari pemerintah pusat, hal tersebut mengakibatkan pemerintah daerah menjadi kurang mandiri. Seharusnya bantuan dari pemerintah pusat dapat menjadi dorongan untuk meningkatkan kemandirian daerah dalam mengoptimalkan potensi-potensi daerah, sehingga pemerintah daerah dalam melakukan pembiayaannya tetap mengandalkan Pendapatan Asli Daerahnya. Dengan menggunakan nilai *Standardized coefficients* pada setiap variabel independen hasilnya dapat diketahui bahwa respon belanja daerah lebih besar kepada DAU jika dari pada melalui respon belanja daerah kepada PAD.

DAU yakni komponen dana perimbangan yang secara rata-rata nilainya jauh lebih besar dibandingkan dengan PAD, DAK, DBH. DAU sendiri dipakai untuk memangkas ketimpangan perekonomian antar daerah di Indonesia. Dana Alokasi Umum ditetapkan bersumber pada besar kecilnya *fiscal gap* sebuah daerah yang adalah selisih diantara *fiscal needs* dengan *fiscal capacity* (potensi daerah). Apabila suatu daerah punya potensi fiskalnya tinggi namun kebutuhan fiskalnya kecil akan mendapatkan DAU yang relative rendah. Begitupun kebalikannya, apabila suatu daerah punya potensi fiskalnya rendah namun kebutuhan fiskalnya besar cenderung akan mendapatkan DAU yang relative tinggi.

DAK punya pengaruh positif kepada belanja daerah, namun tidak terjadi peristiwa Flypaper Effect dalam komponen tersebut disebabkan atas Dana Alokasi Khusus adalah komponen dana perimbangan yang dengan rata-rata nilainya relative lebih kecil dari Dana Alokasi Umum serta hanya dipakai guna melakukan pendanaan terhadap kegiatan tertentu yang adalah bagian dari prioritas nasional serta jadi urusan daerah.

DBH punya pengaruh positif kepada belanja daerah, namun tidak berlangsung peristiwa Flypaper Effect dalam komponen tersebut disebabkan karena DBH yakni komponen dana perimbangan yang secara rata-rata nilainya relative lebih kecil dibandingkan dengan DAU. Sama seperti DAU, DBH ini juga mempunyai hubungan kepada belanja daerah, hanya saja Dana Bagi Hasil ini didasarkan pada besarnya penerimaan baik pajak, cukai ataupun sumber daya alam pada daerah tersebut yang disumbangkan untuk nasional yang kemudian dikembalikan lagi untuk daerah tersebut selaku DBH. Sehingga semua daerah menerima DBH dengan besaran sesuai dengan kontribusinya terhadap penerimaan nasional.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Pada penelitian ini peneliti punya keterbatasan ialah terdapat beberapa daerah yang memiliki hasil Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ditampilkan berupa scan sehingga hasilnya cukup sulit ketika dilakukan pembacaan yang menyebabkan peneliti sulit dalam memahaminya, kemudian guna melihat Laporan Realisasi Anggaran yang dipakai pada penelitian ini perlu terlebih dahulu melakukan pemeriksaan terhadap Catatan Atas Laporan Keuangan

5.3 Saran

Berumber atas kesimpulan serta keterbatasan yang sudah dijelaskan diatas, guna mendapatkan hasil penelitian yang semakin baik lagi terdapat saran-saran seperti berikut:

1. Untuk pemerintah daerah diharapkan hasil riset ini bisa memberikan fakta terkait dengan aspek-aspek yang mempunyai pengaruh terhadap belanja daerah. Dan diharapkan selaku bahan informasi serta pertimbangan bagi pemerintah daerah dimana ketika mengelola belanja daerah, pemerintah daerah dapat memanfaatkan sumber pendapatan lainnya salah satunya seperti Pendapatan Asli Daerah maka tidak hanya tergantung pada transfer dari pemerintah pusat, supaya dalam pengelolaan pendapatan yang dimiliki dapat direalisasikan secara optimal agar dapat meningkatkan pelayanan publik dan pembangunan daerah demi kesejahteraan masyarakat. Kemudian pemerintah daerah diharapkan bisa untuk menambah PADnya supaya pemerintah daerah ketika melakukan belanja tidak lagi tergantung kepada dana transfer yang dibagikan atas pemerintah pusat.
2. Bagi peneliti berikutnya diharapkan bisa menambahkan variabel dan menguji variabel lainnya yang mempunyai pengaruh terhadap belanja daerah seperti SiLPA karena SiLPA yakni selisih lebih realisasi penerimaan serta pengeluaran anggaran sepanjang satu periode anggaran. SiLPA yakni sumber penerimaan pembiayaan untuk struktur APBD, SiLPA bisa dipakai guna menutupi kekurangan anggaran bila realisasi pendapatan lebih kecil dibandingkan realisasi belanja. Serta Pajak Daerah dimana pajak daerah merupakan kontribusi wajib terhadap daerah yang terutang dari orang pribadi ataupun badan yang bersifat memaksa bersumber pada UU.